

# Implementasi Program Smart Village Dalam Mewujudkan Desa Mandiri, Maju dan Sejahtera di Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan

Andri Marta<sup>1</sup> Kris Ari Suryandari<sup>2</sup>

1,2Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fisip Universitas Lampung

Email: [andrimarta90@fisip.unila.ac.id](mailto:andrimarta90@fisip.unila.ac.id)

**Abstrak:** Kecamatan Jati Agung merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan yang diamankan oleh provinsi lampung untuk mencoba melakukan program Smart Village ini. Program Smart Village di Kecamatan Jati Agung ini menitikberatkan bagaimana pemerintah desa mampu melakukan integrasi sistem informasi layanan administrasi pemerintahan desa. Pengembangan Smart Village dalam prosesnya memerlukan analisis tentang berbagai nilai, karakter dan norma yang ada di masyarakat. Hal ini menjadi penting karena masyarakat ditempatkan sebagai customer dari teknologi informasi. Hal inilah yang menjadi permasalahan yang mendasar dalam penerapan program tersebut. Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah tipe penelitian kualitatif. Lokasi penelitian ini di Kecamatan Jati Agung Besar Kabupaten Lampung Selatan. Data primer di peroleh melalui observasi, wawancara, , FGD dan kunjungan lapang. Hasil penelitian ini adalah Impelemntasi program Smart Village di Kecamatan Jati Agung sudah berjalan dengan baik baik itu hal itu terlihat dari pemanfaatan smart governmet dalam pelayanan publik seperti pembayaran pajak dan promosi pariwisata sudah berjalan dengan baik. Hambatan dalam program ini adalah terkendala terbatasnya SDM yang hanya beberapa orang yang menguasai aplikasinya selain itu juga anggaran yang terbatas mengakibatkan belum maksimalnya program ini disetiap desa yang ada di Kecamatan Jati Agung.

**Kata kunci:** Implementasi, Smart Vilage, Desa Mandiri, Maju dan Sejahtera

**Abstract:** Jati Agung District is one of the districts in South Lampung Regency that has been designated by the Lampung province to implement the Smart Village program. The Smart Village program in Jati Agung District focuses on how village governments can integrate information systems for village administrative services. The development of Smart Villages requires an analysis of the various values, characteristics, and norms present in the community. This is important because society is positioned as the customer of information technology. This is the fundamental issue in the implementation of the program. The type of research in this study is qualitative research. The location of this research is in the Jati Agung Besar District of South Lampung Regency. Primary data is obtained through observation, interviews, focus group discussions, and field visits. The result of this research is that the implementation of the Smart Village program in Jati Agung District has been progressing well, as evidenced by the utilization of smart government in public services such as tax payments and tourism promotion, which are functioning effectively. The obstacles in this program are hindered by the limited human resources, with only a few individuals proficient in the application. Additionally, the constrained budget has resulted in the program not being fully optimized in each village within the Jati Agung sub-district.

**Keywords:** Implementation, Smart Village, Independent, Advanced and Prosperous Village

## Pendahuluan

Pemerintah Indonesia dalam hal ini dalam melaksanakan amanat UU No. 6/2014 tentang Desa telah mengalokasikan dana desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2015 jumlah dana desa sebesar Rp 20,8 triliun, di tahun 2016 Rp 46,8 triliun, di tahun 2017 Rp 60 triliun, di tahun 2018 Rp 111 triliun, dan di tahun 2019 mencapai angka Rp 113 triliun. Dengan jumlah dana yang prestis itu, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mencanangkan terwujudnya 2.000 desa mandiri pada akhir tahun 2019 yang lalu. Upaya pemerintah untuk melakukan pencapaian sasaran pembangunan desa dan pedesaan ini, pemerintah mengembangkan Indeks Desa Membangun (IDM) yang tertuang dalam Buku RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2015-2019. Berdasarkan RPJMN ini capaian dari target strategis adalah mengurangi jumlah desa tertinggal hingga 5000 desa dan meningkatkan jumlah desa mandiri sedikitnya 2000 desa di tahun 2019 yang lalu. Sasaran pembangunan tersebut memerlukan kejelasan desa dan status perkembangannya. Indeks desa membangun tidak hanya berguna untuk mengetahui status perkembangan setiap desa yang lekat dengan karakteristiknya, tetapi juga dapat dikembangkan sebagai instrumen untuk melakukan targetting dalam pencapaian target RPJMN 2015-2019.

Problem yang dialami oleh pemerintah dalam mengurangi jumlah desa tertinggal dan meningkatkan jumlah desa mandiri ialah masalah kemiskinan. Di mana kemiskinan selalu mendapat perhatian lebih dari pemerintah Indonesia. Hal ini terjadi karena pemerintah sadar akan pentingnya mengatasi persoalan kemiskinan. Jika gagal mengatasi persoalan ini maka dapat menimbulkan munculnya berbagai persoalan sosial, ekonomi dan politik di tengah masyarakat. Masyarakat miskin pada umumnya memiliki kelemahan dalam berusaha karena terbatasnya sarana dan prasarana. Terlebih lagi akses dalam bidang ekonomi sehingga masyarakat miskin semakin tertinggal jauh dengan masyarakat yang memiliki akses dan potensi yang lebih tinggi. Menurut Janianton Damanik (2005 : 17) , kemiskinan merupakan salah satu indikator pembangunan yang sangat penting. Seberapa maju dan berhasil pembangunan akan tampak dari perubahan-perubahan yang signifikan pada besarnya kemiskinan itu sendiri. Itulah sebabnya pemerintah memiliki kepentingan yang sangat fundamental dalam mengatasi kemiskinan.

Pemerintah memiliki tanggungjawab yang besar dalam memberantas kemiskinan. Usaha pemerintah ini terwujud dalam bentuk program-program pembangunan yang sudah direncanakan sebelumnya. Hakekat tujuan pembangunan adalah terciptanya kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Upaya tersebut ditempuh dengan melakukan berbagai program pembangunan yang menyentuh semua masyarakat dan wilayah. Pada prosesnya untuk melihat seberapa meningkat kesejahteraan dan pembangunan di suatu daerah perlu adanya tolok ukur. Peningkatan ini dapat ditandai dengan adanya perubahan struktur di beberapa bidang seperti bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik maupun budaya. Di Indonesia khususnya di desa untuk melihat seberapa maju dan berkembangnya suatu desa dapat dilihat dari statusnya. Status desa ini dapat diketahui melalui kemajuan dan kemandirian desa yang ditetapkan berdasar indeks desa membangun, klasifikasi status desa tersebut meliputi desa mandiri, desa maju, desa berkembang, desa tertinggal dan desa sangat tertinggal. Desa mandiri merupakan status desa tertinggi diantara empat status lainnya, dimana desa mandiri memiliki tingkat kesejahteraan masyarakat yang meningkat dan jumlah kemiskinan yang rendah. Berdasarkan status Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2020 secara nasional Provinsi Lampung berada di Peringkat 12 dengan nilai IDM Provinsi tahun 2020 sebesar 0,6656 dengan status berkembang. Khusus di Provinsi Lampung dari 2.435 desa yang tersebar

di 203 kecamatan dan 13 kabupaten di Bumi Ruwai Jurai terdapat 6 desa sangat tertinggal, 226 desa tertinggal, 1.812 desa berkembang, 370 desa maju dan 21 desa mandiri

Pada tahun 2020 hingga saat ini yang lalu pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa meluncurkan program yang bertujuan untuk menjadikan desa-desa di Lampung menjadi desa mandiri, maju dan sejahtera program tersebut di beri nama Smart Village. Pengembangan Smart Village harus dipahami sebagai kondisi yang menunjukkan adanya dorongan dari bawah, yaitu dari masyarakat untuk lebih bisa menggali potensi dan meningkatkan kapasitas yang dimilikinya. Keinginan tersebut kemudian didorong oleh pemerintah desa sebagai cara untuk memberikan pembinaan dan pemberdayaan agar terwujud peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian pemanfaatan teknologi informasi dijadikan sebagai alat atau “tools” dalam upayanya mewujudkan keinginan tersebut dan bukan sebagai tujuan atau “goals”. Dari pemahaman tersebut, maka pengembangan smart village didasarkan kepada pendekatan dari bawah “bottom-up” atas prakarsa dan keinginan masyarakat, sehingga adanya penguatan kelembagaan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah desa melalui pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dengan pemanfaatan teknologi informasi sepenuhnya dilakukan dalam kapasitas pemerintah sebagai fasilitator. Dengan begitu, maka sasaran masyarakat yang dituju jelas merupakan kategori masyarakat menengah, miskin dan belum terberdayakan, sehingga pengembangan teknologi informasi mampu mendorong kelompok masyarakat tersebut mencapai peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup.

Berdasarkan juknis Smart Village yang ada di dinas pemberdayaan masyarakat desa Provinsi Lampung bahwa konsep Smart Village memiliki 3 (tiga) tujuan besar yaitu, pemerintahan desa, Ekonomi Kreatif dan Pemberdayaan SDM. Pada bagian pemerintahan desa diharapkan desa mampu melakukan optimalisasi sistem informasi dan layanan administrasi pemerintahan desa. Pada bagian ekonomi kreatif ini desa mampu melakukan optimalisasi dan profesionalitas bumdes, koperasi dan industri rumahan, ukm, wisata desa. Pada bagian pemberdayaan SDM diharapkan desa mampu melakukan inkubasi desa. Program Smart Village konsep utamanya adalah kita ingin mendorong desa-desa secara cerdas memahami seluruh potensi desa. Memetakan apa yang menjadi nilai-nilai positif dari desa, baik itu material maupun imateril. Tahun 2020 yang lalu pemerintah Provinsi Lampung menjadikan 30 Desa sebagai projek Smart Village di Lampung dan pada tahun 2021 ini 100 desadi targetkan untuk mengikuti program Smart Village ini.

Kecamatan Jati Agung merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan yang diamankan oleh provinsi Lampung untuk mencoba melakukan program Smart Village. Program Smart Village di Kecamatan Jati Agung ini menitikberatkan bagaimana pemerintah desa mampu melakukan integrasi sistem informasi layanan administrasi pemerintahan desa. Melalui program ini kita berharap warga desa bisa menikmati layanan prima dari seluruh layanan yang diberikan oleh desa, tidak terbatas ruang dan waktu. Artinya kendala- kendala teknis bisa diminimalisir oleh sistem informasi layanan administrasi pemerintahan desa. Pengembangan Smart Village dalam prosesnya memerlukan analisis tentang berbagai nilai, karakter dan norma yang ada di masyarakat. Hal ini menjadi penting karena masyarakat ditempatkan sebagai customer dari teknologi informasi. Hal inilah yang menjadi permasalahan yang mendasar dalam penerapan program tersebut. Masyarakat harus terbiasa dalam teknologi informasi sedangkan kita ketahui bagaimana masalah jaringan dan SDM yang ada di desa belum cukup mumpuni dalam melaksanakan program Smart Village yang menitikberatkan pada jaringan sistem informasi. Selain itu juga aparatur desa harus bisa

merubah pandangan mereka dalam pelayanan publik sebagai pelayan masyarakat dan tidak mengambil keuntungan dari layanan-layanan yang diberikan oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah desa di Kecamatan Jati Agung harus melaksanakan konsep pembangunan pentahelix yakni melibatkan unsur pemerintah, masyarakat/komunitas, akademisi, pengusaha, dan media bersatu membangun kebersamaan dalam pembangunan.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka peneliti tertarik untuk melihat implementasi program Smart Village dalam mewujudkan desa mandiri, maju dan sejahtera di Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan yang sesuai dengan tujuan dan visi-misi dari pemerintah provinsi Lampung untuk membentuk desa Berjaya.

## **Metode**

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan informan sebanyak 7 (tujuh) orang terdiri dari unsur Pemerintah Kecamatan hingga desa di Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah: Program Smart Village yang sudah diterapkan di Desa- Desa di Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, Proses Implementasi Program Smart Village yang ada di Desa-desa Di Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, Hambatan serta Dampak yang ditimbulkan dari penerapan program Smart Village yang ada di Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung . Sumber data diperoleh melalui data primer dan data sekunder. Pengambilan data primer dilakukan dengan metode observasi, wawancara, sementara data sekunder diperoleh melalui studi dokumen. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan

## **Hasil dan Pembahasan**

Untuk mengetahui Implementasi Program Smart Village dalam mewujudkan Desa maju mandiri dan sejahtera di Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan yang didasarkan dari pendekatan top-down yang dirumuskan oleh Van Meter dan Van Horn dimana terdapat enam variabel dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan, yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber-sumber kebijakan, komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, karakteristik-karakteristik agen pelaksana, pelaksana (implementor), serta kondisi ekonomi, sosial, dan politik (Situmorang, 2016). Berikut ini peneliti akan membahas lebih lanjut terkait analisis hasil penelitian.

### **1. Ukuran dan tujuan kebijakan**

Berdasarkan indikator pencapaian yang telah terealisasi di Kecamatan Jati Agung, dimana proses pelaksanaan program smart village di Kecamatan Jati Agung ini telah terealisasi. Hal tersebut dapat terlihat dari tercapainya indikator smart village yang pertama, yaitu smart government. Pemerintah Kecamatan Jati Agung telah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi melalui penggunaan website dan tersedianya pelayanan publik yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi di Kecamatan Jati Agung, yaitu Jati Agung Service Center (TSC) sebagai salah satu bentuk implementasi dari program smart village. Selain itu, pendataan penduduk yang telah tersinkronisasi pada website Kecamatan Jati Agung juga memudahkan aparatur desa serta masyarakat dalam proses pelayanan yang diberikan. Kemudian, tercapainya indikator smart village yang kedua, yaitu smart community dimana masyarakat Kecamatan Jati Agung melalui Pokdarwis Kecamatan Jati Agung telah mampu memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemasaran pariwisata melalui media sosial sehingga dapat mengoptimalkan pemasaran pariwisata Temiang Hill di Kecamatan Jati Agung serta tersedianya pembayaran pajak secara online di BumDes Jati Agung. Untuk indikator smart village yang ketiga, yaitu smart environment, masyarakat Kecamatan Jati Agung telah memanfaatkan wilayah mereka untuk dijadikan wisata

edukasi perkebunan yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Jati Agung dan sekitarnya. Selain itu, masyarakat Kecamatan Jati Agung juga cukup baik dalam menjaga lingkungan sekitar, dimana pada peringatan hari lingkungan hidup sedunia dan hari peduli sampah nasional Pemerintah Kecamatan Jati Agung bersama dengan masyarakat Kecamatan Jati Agung mengadakan kegiatan bakti sosial dan gotong royong sebagai bentuk menjaga dan melestarikan lingkungan sekitar serta kepedulian masyarakat terhadap lingkungan dan masalah sampah yang terjadi setiap tahunnya.

## **2. Sumber-Sumber Kebijakan**

Berdasarkan indikator sumber-sumber kebijakan Van Meter dan Van Horn, dapat dikatakan bahwa mengenai sumber daya manusia dalam implementasi program smart village di Kecamatan Jati Agung belum maksimal. Jika dilihat dari Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Smart Village Provinsi Lampung 2020-2024, dimana pemerintah desa merupakan penyelenggara urusan pemerintahan untuk kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari poin tersebut dapat dilihat bahwa dalam pelaksanaan program smart village di Kecamatan Jati Agung ini pemerintah desa memiliki peran yang penting dalam keberhasilan pelaksanaan program smart village di Kecamatan Jati Agung. Namun, dalam pelaksanaannya masih banyak perangkat desa yang tidak memahami dengan baik bagaimana pelaksanaan program smart village sehingga hanya sebagian saja yang aktif dan sebagian lainnya hanya berpartisipasi pasif dalam pelaksanaan program smart village di Kecamatan Jati Agung.

Selain sumber daya manusia, tentu saja terdapat sumber lainnya yang perlu diperhatikan dalam proses implementasi suatu program. Sumber-sumber lain tersebut adalah sumber daya finansial. Jika sumber daya manusia tersedia dengan baik, namun tidak diiringi dengan anggaran dana maka implementasi suatu program tidak dapat berjalan. Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan tentu saja membutuhkan anggaran dana yang cukup besar. Terkait sumber daya finansial ini, dalam proses pelaksanaan program smart village di Kecamatan Jati Agung mendapatkan anggaran dana yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Lampung sebesar 30 juta rupiah untuk menunjang pelaksanaan program smart village di Kecamatan Jati Agung. Namun, dana yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Lampung tersebut masih dirasa kurang untuk memenuhi sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pelaksanaan program smart village karena dalam pelaksanaannya dibutuhkan lebih banyak alat yang dapat menunjang pelaksanaan program smart village agar berjalan dengan baik. Saat ini Pemerintah Kecamatan Jati Agung hanya memiliki satu alat tap KTP yang tersedia di kantor Kecamatan Jati Agung. Padahal idealnya alat tap KTP tersebut seharusnya tersedia di setiap dusun yang ada di Kecamatan Jati Agung sehingga jika ada masyarakat yang ingin melakukan pelayanan publik tidak perlu lagi datang ke Kantor Kecamatan Jati Agung. Namun, hal tersebut belum dapat terealisasi karena adanya ketebatasan dana anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Lampung.

## **3. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan**

Berdasarkan pelaksanaan program smart village di Kecamatan Jati Agung komunikasi berperan sangat penting. Komunikasi sangat dibutuhkan agar pelaksanaan program smart village dapat berjalan dengan baik. Ini semua dilakukan agar tidak terjadi miskomunikasi dalam pelaksanaan program smart village sehingga tugas dan fungsi masing-masing organisasi pelaksana harus sudah dipahami. Model komunikasi yang digunakan oleh Pemerintah Kecamatan Jati Agung dengan pelaksana program smart village Provinsi Lampung adalah model komunikasi konvergen. Komunikasi konvergen dapat didefinisikan sebagai suatu proses konvergen (memusat) dengan informasi yang disepakati bersama oleh pihak-pihak yang berkomunikasi dalam rangka mencapai pengertian (Mukarom, 2020). Menurut model komunikasi konvergen, komunikasi dikatakan efektif jika tercapai pemahaman bersama antara partisipan dan penerima pesan atau informasi.

Model komunikasi konvergen memiliki kelebihan, yaitu terjadinya pertukaran informasi dua arah dan memperhatikan kebutuhan serta adanya saling berbagi informasi. Melalui model komunikasi konvergen ini akan menghasilkan saling pengertian, persetujuan bersama, dan kerjasama. Dalam model konvergen, saling pengertian berarti terbentuknya pengertian yang relatif sama antara peserta komunikasi mengenai suatu realitas atau obyek komunikasi (Aminah, 2014). Namun, model komunikasi konvergen ini memiliki kekurangan, yaitu ketika informasi yang disampaikan tidak mencapai pengertian bersama dan kesepakatan bersama maka maksud dan tujuan pemberi komunikasi tidak tercapai dan komunikasi tidak akan berjalan dengan baik karena antara pemberi informasi dan penerima informasi tidak saling pengertian.

Berdasarkan pengertian mengenai model komunikasi tersebut, komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Jati Agung dengan pihak pelaksana program smart village Provinsi Lampung sudah berjalan dengan efektif. Hal tersebut dikarenakan program smart village ini merupakan program yang dikeluarkan langsung oleh Pemerintah Provinsi Lampung sehingga komunikasi dilakukan secara konvergen (memusat) dimana Pemerintah Kecamatan Jati Agung sebagai penerima informasi dapat memahami dengan cukup baik informasi yang diberikan oleh pihak pelaksana program smart village Provinsi Lampung.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, komunikasi mengenai pelaksanaan program smart village di Kecamatan Jati Agung sudah dilakukan dengan cukup baik karena antara penanggungjawab pelaksanaan program smart village di tingkat desa dengan penanggungjawab pelaksanaan program smart village di tingkat provinsi telah memiliki grup di aplikasi WhatsApp sehingga komunikasi dan koordinasi dapat dilakukan melalui aplikasi tersebut. Selain itu, dari pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan juga melakukan monitoring ke Kecamatan Jati Agung untuk melihat dan memantau bagaimana pelaksanaan program smart village di Kecamatan Jati Agung.

#### ***4. Karakteristik-karakteristik badan pelaksana***

Pada awal penetapan lokasi sasaran program smart village Provinsi Lampung, dilakukan bimbingan teknis dan sosialisasi mengenai program tersebut kepada perwakilan dari setiap desa. Hal ini dilakukan agar para perwakilan desa sebagai penanggungjawab pelaksanaan program smart village dapat berpikiran terbuka dan menerima serta menerapkan pengetahuan yang disampaikan saat bimbingan teknis dan sosialisasi sehingga nantinya aparatur dan masyarakat di desa dapat menerima dengan baik program yang akan dilaksanakan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa Kecamatan Jati Agung ini termasuk desa yang cukup aktif dalam mengembangkan potensi desanya. Hal tersebut terlihat dari Kecamatan Jati Agung yang sudah masuk dalam kategori desa mandiri di Kabupaten Lampung Selatan. Kemudian, pada tahun 2020 Kecamatan Jati Agung masuk dalam kategori 5 besar dalam lomba desa tingkat Provinsi Lampung. Selain itu, Kepala Kecamatan Jati Agung yang termasuk dalam agen pelaksana dalam proses implementasi juga mendapatkan sebuah apresiasi dari Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan sebagai Kepala Desa Inovatif di Kabupaten Lampung Selatan. Karakteristik agen pelaksana yang cukup aktif dan berorientasi pada kemajuan desa dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat sehingga dapat berkontribusi dan bekerjasama dalam mengembangkan Kecamatan Jati Agung melalui pelaksanaan program smart village yang dilaksanakan di Kecamatan Jati Agung.

#### ***5. Kecenderungan pelaksana (implementor)***

Sikap penerimaan dalam pelaksanaan program smart village ini ditunjukkan dengan berjalannya program smart village ini di Kecamatan Jati Agung. Meskipun program smart village ini merupakan program yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung, namun aparatur dan masyarakat di Kecamatan Jati Agung cukup menerima dengan baik program tersebut. Hal tersebut dikarenakan di era perkembangan zaman yang semakin maju maka dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan desa

akan membantu desa berkembang dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Para staff dan masyarakat di Kecamatan Jati Agung cukup menerima dengan baik program smart village ini dan merasa terbantu dengan adanya program tersebut. Hal tersebut dapat terlihat dari pegawai di Kecamatan Jati Agung hingga masyarakat di Kecamatan Jati Agung merasakan bahwa program ini memberikan dampak yang baik bagi kemajuan pelayanan di Kecamatan Jati Agung serta memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses pelayanan publik di Kecamatan Jati Agung. Penerimaan terhadap program smart village di Kecamatan Jati Agung ini tentu saja menandakan bahwa program ini diimplementasikan dengan cukup baik sehingga para implementor kebijakan menerima dengan baik.

Kecenderungan pelaksana (implementor) di Kecamatan Jati Agung terlihat bahwa dari pihak pemerintah desa maupun masyarakat memang menerima dengan baik program smart village ini. Namun, untuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program smart village di Kecamatan Jati Agung ini cenderung pasif. Masyarakat hanya menerima dengan baik adanya program dengan mengikuti berbagai arahan yang diberikan oleh pihak desa, namun tidak berkontribusi aktif dalam pelaksanaannya.

#### **6. *Kondisi ekonomi, sosial, dan politik***

Dilihat dari kondisi ekonomi, dalam implementasi program smart village di Kecamatan Jati Agung secara umum sudah kondusif. Kecamatan Jati Agung memiliki potensi sumber daya alam yang telah dikembangkan. Kecamatan Jati Agung dapat memanfaatkan potensi desa untuk mengembangkan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan objek wisata alam Temiangan Hill yang memberikan peluang usaha bagi masyarakat di Kecamatan Jati Agung. Jika dikaitkan dengan program smart village yang dilaksanakan di Kecamatan Jati Agung, pengelola Pokdarwis di Kecamatan Jati Agung ini telah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan baik untuk memasarkan wisata Temiangan Hill agar dapat dikenal oleh masyarakat luar melalui sosial media, seperti Instagram, Facebook, Youtube, dan Whatsapp. Selain itu, dari pihak Kecamatan Jati Agung juga membantu mengenalkan wisata Temiangan Hill melalui website Pemerintah Kecamatan Jati Agung sehingga saat orang mengunjungi website dapat juga melihat wisata Temiangan Hill.

Selain memiliki potensi ekonomi dalam bidang kepariwisataan, Kecamatan Jati Agung juga memiliki BumDes yang cukup aktif. BumDes Jati Agung ini didirikan pada tahun 2016, namun baru memulai kegiatan usaha pada tahun 2018. BumDes Jati Agung juga menjalankan berbagai kegiatan usaha, yaitu memiliki usaha pertamini, BRILink, ekspedisi pengiriman JNE, kios sarana dan prasarana pertanian, sembako,UMKM, dan juga pembayaran pajak online melalui e-Samdes. e-Samdes ini merupakan cara pembayaran pajak secara online. Dengan adanya usaha e-Samdes ini memudahkan masyarakat dalam membayarkan pajak kendaraan karena masyarakat hanya perlu datang ke BumDes Kecamatan Jati Agung dengan membawa STNK, BPKB, dan KTP setelah itu pembayaran pajak kendaraan dapat dilakukan secara online.

Kondisi sosial juga berpengaruh terhadap implementasi suatu kebijakan. Jika kondisi sosial mendukung pelaksanaan implementasi kebijakan, maka kemungkinan besar implementasi kebijakan dapat berhasil diimplementasikan. Di Kecamatan Jati Agung sendiri kondisi sosial masyarakat yang cukup terbuka akan sebuah perubahan membuat implementasi program smart village di Kecamatan Jati Agung berjalan dengan baik. Kondisi sosial masyarakat di Kecamatan Jati Agung ini cukup kondusif dalam mendukung pelaksanaan program smart village di Kecamatan Jati Agung. Kondisi politik ini berkaitan dengan bagaimana hubungan kepemimpinan dengan pelaksanaan program smart village di Kecamatan Jati Agung. Dalam hal kepemimpinan, Kepala Kecamatan Jati Agung dapat dikatakan sudah memimpin dengan cukup baik dalam pelaksanaan program smart village di Kecamatan Jati Agung. Dimana tujuan dari Kepala Kecamatan Jati Agung adalah melalui program smart village ini dapat memberikan dampak perubahan bagi masyarakat di Kecamatan Jati Agung

menjadi lebih baik.

Pada proses nya implementasi program smart village ini mempunyai beberapa faktor penghambat. Hambatan utama terletak pada keterbatasan sumber daya manusia yang berkualitas, di mana banyak perangkat desa masih kurang memahami mekanisme program Smart Village. Hal ini menghambat partisipasi aktif mereka, meskipun mereka seharusnya berperan penting sebagai implementor. Selain itu, ada kendala finansial yang menghambat pengadaan alat penunjang yang memadai untuk implementasi program. Meski begitu, informasi tidak menjadi penghalang karena komunikasi dari pemerintah provinsi sudah cukup jelas, termasuk melalui sosialisasi dan bimbingan teknis serta pemanfaatan grup WhatsApp untuk menghindari miskomunikasi. Dukungan dari masyarakat dan aparat desa cukup baik, namun partisipasi aktif mereka masih kurang. Pembagian tugas dan wewenang dalam program sudah sesuai dengan potensi yang ada, sehingga ini tidak menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaannya.

### **Kesimpulan**

Pelaksanaan Program Smart Village di Kecamatan Jati Agung mencakup tiga aspek utama: smart government, smart community, dan smart environment. Dalam smart government, penggunaan teknologi melalui website kecamatan dan Trimulyo Service Center untuk pelayanan terpadu sudah berjalan. Pada smart community, pemasaran pariwisata lokal dan pemanfaatan teknologi dalam pembayaran pajak online menjadi contoh penerapan yang baik. Sementara itu, smart environment tercermin dari pemanfaatan alam sebagai objek wisata serta upaya pelestarian budaya dan lingkungan.

Berdasarkan analisis menggunakan indikator keberhasilan dari Van Meter dan Van Horn, beberapa poin kunci dari implementasi program ini adalah: Ukuran dan tujuan kebijakan telah jelas., Terdapat realisasi yang baik dari segi *smart government*, *smart community*, dan *smart environment*. Sumber daya manusia di kecamatan ini belum optimal, begitu pula dengan keterbatasan anggaran. Komunikasi antarorganisasi sudah efektif dengan model komunikasi konvergen. Agen pelaksana dan kecenderungan implementor cukup menerima program ini dengan baik, namun masih kurang partisipasi aktif dari perangkat desa dan masyarakat. Secara keseluruhan, meski program Smart Village di Kecamatan Jati Agung telah berjalan dengan baik pada beberapa aspek, masih diperlukan peningkatan partisipasi masyarakat dan perbaikan kualitas sumber daya untuk mendukung keberhasilan program secara menyeluruh.

### **Referensi**

Ahmadi, Abu. 2002. Psikologi Sosial. Rineka Cipta. Jakarta.

Arikunto, Suharsini. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Rineka cipta. Jakarta.

Budi Harjo. 2018. Model Of Building An Independent Village. Jurnal Sosial Politik Fisip Unila. Bandarlampung

European Network for Rural Development no 26 ISSN 1831-532

Janianton Damanik, Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pariwisata (Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, 2005), hal. 17.

Karmilasari, V. (2018). Analisis penyelenggaraan pemerintahan pasca pemekaran di kelurahan sempaja timur kota samarinda 1. 10–18.

<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30872/jar.v6i1.1895>

Prasetyo, Bambang dan Lina Miftahul. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif. PT Rajagrafindo Persada. Jakarta

Sugiyono. 2002. Metode Penelitian Bisnis. CV Alfabeta. Jakarta

T.V, Ramachandra, dkk. (2015). Smart Ragihalli: Efforts towards Self-Reliant & Self Sufficient system empowering Man Power (rural youth) with Aproprate rural technologies. ETR 90. Smart Village, Energy & Wetlands Research Group, CES,IISc. From [https://www.researchgate.net/publication/318034841\\_SMART\\_VILLAGE\\_FRAMEWORK](https://www.researchgate.net/publication/318034841_SMART_VILLAGE_FRAMEWORK)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Wahab,Solichin Abdul. 2004. Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Bumi Aksara. Jakarta.

Wahab. Abdul. 2001. Konsep Pembangunan Daerah. Grasindo. Jakarta

Widjaja, H. A.W. 2001. Pemerintahan Desa/Marga Berdasarkan Undang- undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. PT. RajaGarafindo Persada. Jakarta.